



Kelompok Bangkok Jadi Tersangka Lagi Kasus Perjalanan Dinas di Gianyar

DENPASAR - Sebelumnya memang tersiar kabar bahwa akan ada lanjutan kasus perjalanan dinas (perdin) Gianyar. Setelah 14 terdakwa menjalani sidang, disebutkan sudah ada 9 tersangka lagi yang akan dilimpahkan ke kejaksaan. Dan, ternyata 4 dari 9 tersangka itu adalah 4 orang yang sudah jadi terdakwa.

Informasi yang dirangkum koran ini di Kejati Bali, ada sembilan tersangka yang sudah P21 atau berkasnya lengkap. Penyidikan dilakukan di Polda Bali, jaksa penuntut umum (JPU) nantinya adalah Gede Arthana, Junaedi Tandji, dan Hari Sutopo. Dari berkas itu disebutkan 9 menjadi tersangka dalam perjalanan dinas fiktif. "Mestinya ke Bogor, namun dialihkan ke Malaysia," jelas sumber koran ini.

Yang menarik dari 9 orang yang ke Malaysia ini ada empat orang yang sudah menjadi terdakwa. Dijelaskan bahwa empat orang itu adalah orang yang sebelumnya ke Thailand. Kelompok empat ini adalah Sekcam Tampaksiring Dewa Made Putra, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Ubud Ketut Ritama, Sang Ayu Made Ika Kencana Dewi sebagai staf Camat di Tampaksiring, dan Ni Ketut Juniantari sebagai staf di Dinas Perhubungan Gianyar ■

► Baca *Kelompok...* Hal 31

Sudah ke Bangkok, ke Malaysia Juga

■ KELOMPOK...

Sambungan dari hal 21

"Empat orang yang ke Thailand itu jadi tersangka lagi dalam kasus ke Malaysia. Empat orang adalah orang lama, lima orang tersangka adalah orang baru," jelas sumber tadi.

Dia juga mengatakan, perjalanan dinas fiktif ke Bogor ini terjadi lantaran kasus ke Thailand banyak yang protes. Karena empat orang yang terdiri

dari dua cowok dan dua cewek, itu ke Thailand banyak yang tidak tahu. "Banyak protes, *kok* malah bisa ke luar negeri. Atas kondisi ini, yang protes - protes ini akhirnya dirancang lagi perjalanan dinas ke Malaysia," imbuhnya.

Atas kondisi ini koran ini sempat mengkonfirmasi ke salah satu jaksa, yaitu Hari Sutopo. Dia membenarkan memang ada 9 tersangka lagi dalam kasus serupa, namun

tujuannya adalah Malaysia. Dari 9 orang itu memang 4 adalah terdakwa yang saat ini disidang. "Kasusnya sudah P21, namun kami belum tahu kapan akan pelimpahan tahap dua," jelasnya.

Seperti halnya berita sebelumnya, dalam dakwaan 14 terdakwa itu dijelaskan, 14 orang ini semestinya berangkat ke Kota Depok, untuk studi banding. Tapi, kenyataannya empat orang malah terbang ke

Bangkok, Thailand. Sedangkan sisanya berada di Jakarta.

Akibat perbuatan terdakwa merugikan negara Rp 94.900.000, terdakwa diancam dengan Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana telah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang UU yang sama *juncto* Pasal 18 ayat 1 huruf b *juncto* Pasal 55 ayat 1 ke 1 KHUP. Dan, Pasal 3 dalam UU yang sama dalam dakwaan subsider. (art/yes)

Edisi : Sabtu, 21 November 2015

Hal : 21 dan 31



PNS BADUNG

TL Pegawai Naik Berlipat

MANGUPURA - Postur anggaran APBD Kabupaten Badung semakin kentara berpihak pada aparaturnya alias pegawai. Dalam sidang paripurna pembahasan rancangan APBD (RAPBD) 2016 kemarin (20/11) terkuak fakta mengejutkan. Yaitu kenaikan belanja daerah tak langsung (TL) berupa belanja pegawai sekitar Rp 100 miliar lebih. Sementara santunan kematian warga tetap alias tidak mengalami kenaikan. Santunan kematian dari tahun ke tahun tetap Rp 2,5 juta per orang. Penjabat (Pj) Bupati Badung, Nyoman Harry Yudha Saka memaparkan gambaran umum sejumlah kebijakan RAPBD tahun 2016. Pendapatan daerah dirancang sebesar Rp 3,5 triliun lebih. Sedangkan belanja daerah dirancang sebesar Rp 3,6 triliun lebih. Dengan demikian terdapat defisit anggaran sebesar Rp 37 miliar lebih. Rencananya defisit itu ditutupi dari penerimaan pembiayaan dari penggunaan sisa lebih penghitungan tahun anggaran sebelumnya (SILPA 2015).

Yudha Saka juga menjelaskan, dalam rancangan APBD 2016 tersebut juga ada kenaikan belanja daerah tak langsung yakni di belanja pegawai sekitar Rp 100 miliar lebih. Tahun 2015 belanja pegawai tak langsung sebesar Rp 1,1 triliun lebih. Tepatnya Rp 1.117.317.955.595,68. Tapi, tahun 2016 naik 14,80 persen. Akibat kenaikan signifikan itu, belanja pegawai di Badung mencapai Rp 1.282.735.885.834,08.

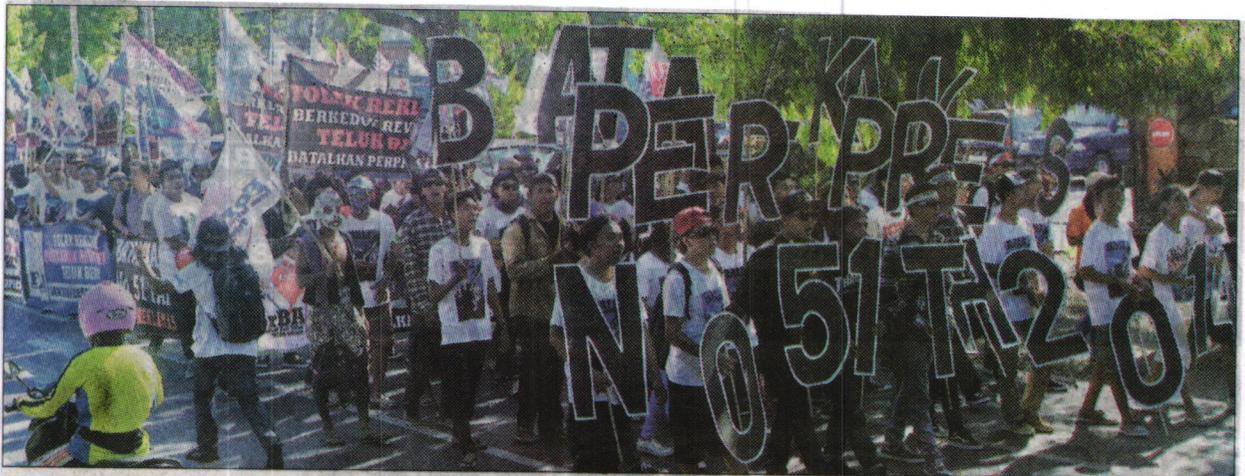
Yudha Saka menjelaskan, kenaikan belanja tidak langsung untuk pegawai ini adalah untuk kegiatan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Dijelaskan, kegiatan itu adalah berkaitan dengan kinerja pegawai. "Kami harapkan peningkatan PAD juga mesti ada peningkatan penghasilan pegawai dan itu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan," dalih Yudha, di hadapan para dewan. Pejabat asal Buleleng tersebut, mengklaim hal itu juga sudah sesuai dengan anjuran pihak KPK. "Seiring dengan peningkatan pendapatan daerah, maka kenaikan untuk tunjangan kinerja pegawai dinaikkan," imbuhnya.

Dalam RAPBD Badung Tahun 2016, jaminan sosial kematian hanya dianggarkan sebesar Rp 5 miliar untuk dua ribu jiwa. Kalangan DPRD Badung mendesak pemerintah menambah bantuan santunan kematian bagi krama Badung. Dewan pun minta ada peningkatan minimal sebesar Rp 5 juta per orang. "Iya, kami minta bantuan santunan kematian ditambah. Menurut kami bantuan Rp 2,5 juta itu terlalu kecil. Kalau bisa ya minimal tahun 2016 diberikan Rp 5 juta. Itu total dananya paling Rp 10 miliar," kata anggota Komisi III DPRD Badung, I Made Sumerta usai rapat.

Pertimbangan politisi asal Pecatu ini mengontrol santunan kematian agar masyarakat yang anggota keluarganya terkena musibah kematian mendapat keringan dari sisi pembiayaan. Mengingat harga-harga barang saat ini sudah melambung tinggi. Santunan kematian yang diberikan pemerintah ini diharapkan bisa membantu pendanaan selama upacara berlangsung. "Sekarang biaya upacara *ngaben* itu mahal. Jadi santunan ini perlu ditingkatkan agar bisa meringankan beban warga kita yang berduka," jelasnya. (san/rid)

Edisi : Sabtu, 21 November 2015

Hal : 24



MIFTAHUDDIN/RADAR BALI

BERAKSI LAGI: Kelompok penolak reklamasi Teluk Benoa kembali menggelar aksi di kawasan Renon, kemarin.

Tiga Tahun Berjuang Terus

Aksi Tolak Reklamasi Digelar Lagi Kemarin

DENPASAR - Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (ForBali) tidak henti-hentinya menyuarakan sikap penolakan reklamasi seluas 700 hektare di

Teluk Benoa. Memasuki tahun ketiga, mereka terus berjuang dan menyampaikan aspirasi. Seperti yang dilakukan kemarin (20/11), ribuan pendemo mendatangi kantor DPRD Bali.

Berbagai spanduk dan atribut penolakan menghiasi demonstrasi yang dinamai Parade Budaya Tolak Reklamasi

asi Berkedok Revitalisasi Teluk Benoa. Mobil komando memimpin barisan panjangnya mencapai hampir 300 meter. Mereka berjalan dari parkir timur lapangan Renon, kemudian mengarah ke utara depan monumen Bajra Sandi dan sampai di gedung DPRD Bali ■

► **Baca Tiga...** Hal 31

Edisi : Sabtu, 21 November 2015

Hal : 21



Radar Bali

Sambungan . . .

ForBali Berbasis Riset dan Penelitian

■ TIGA...

Sambungan dari hal 21

Berbagai orasi secara bergiliran disampaikan oleh para pendemo mewakili daerahnya. Sebagian besar orasi yang disampaikan adalah sebagai bentuk kepedulian terhadap penyelamatan lingkungan dengan menolak pengurangan laut untuk kepentingan bisnis semata.

Dalam aksi tersebut, hadir juga I Made Iwan Dewantama dari Conservation International Indonesia (CII) yang melakukan penelitian terhadap dampak reklamasi di Teluk Benoa. Dalam orasinya, Iwan mengatakan demonstrasi yang dilakukan ini merupakan hal yang tepat. "Saya yakin apa yang kita lakukan hari ini akan menjadi sejarah bagi kita semua," teriaknya disambut dengan suara tolak reklamasi oleh para pendemo.

Dalam riset CII yang dilakukan dengan

peneliti lainnya menjelaskan reklamasi Teluk Benoa akan mengancam aspek sosial ekonomi dan ekologi. Reklamasi akan menyebabkan perubahan salinitas (kadar garam) yang akhirnya akan membunuh ekosistem di teluk. Selain itu, kawasan Teluk Benoa merupakan pertemuan sejumlah daerah aliran sungai (DAS). Ketika reklamasi dilakukan, maka sangat riskan memicu adanya banjir di kawasan sekitar Teluk Benoa.

Dalam penelitian yang dilakukan saat musim hujan yang terus-menerus selama empat jam, pertemuan aliran sungai yang ada itu akan membuang 7.918.717 meter kubik air per empat jam. Akibatnya, air akan naik 0,4 meter. Sementara keberadaan air laut di luar Teluk Benoa tidak bisa diprediksi kalau lebih besar jelas air di Teluk Benoa tidak akan bisa ke mana-mana.

Sementara itu, Koordinator ForBali I Wayan 'Gendo' Suardana mengatakan

pihaknya bersama masyarakat yang menolak reklamasi di Teluk Benoa selama ini selalu berbasis penelitian dan riset. "ForBali memiliki banyak pakar yang tidak dibayar, semua bekerja secara sukarela, jadi saya tegaskan bahwa gerakan ForBali bukan gerakan yang hanya teriak-teriak saja," tegasnya.

Dalam aksi ini juga menampilkan parade budaya seperti baleganjur, tari modern dari Srikandi serta penampilan lawakan Rare Kual yang jauh-jauh hadir dari Buleleng ke Denpasar. "Kami ke sini jauh-jauh untuk ikut demonstrasi tidak dibayar, kami hadir karena ini suara hati nurani kami yang peduli terhadap lingkungan Bali," ujarnya.

Aksi berakhir sekitar pukul 17.00, kemudian dengan rapi, ratusan massa aksi balik ke parkir timur lapangan Renon. Mereka membubarkan diri secara tertib dan tentunya usai aksi di DPRD Bali, mereka membersihkan kembali tempat tersebut. (ara/yes)

Edisi : Sabtu, 21 November 2015

Hal : 31